



DPRD KOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 170/ 40 /419.050/2022

TENTANG

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan Pemerintah terkait penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang salah satunya mengamatkan untuk seluruh jenis pajak dan restribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan restribusi di daerah,serta adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan Struktur Organisasi pada instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi maka perlu penyesuaian terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Kediri Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 70);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah tanggal 17 Mei 2022 Nomor : 188/917/419.033/2022 perihal Perubahan Propemperda Kota Kediri Tahun 2022, dan Rapat Kerja Bapemperda dan Tim Hukum Kota Kediri pada tanggal 17 Mei 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022.**

**KESATU** : Mengubah Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Kediri Tahun 2022, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri dan Pemerintah Kota Kediri dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2022.

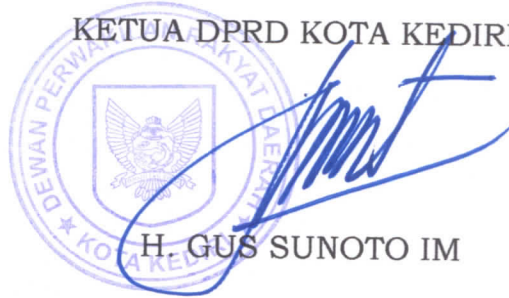
**KETIGA** : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 17 Juni 2022

KETUA DPRD KOTA KEDIRI,

The image shows a circular official seal of the Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri. The seal features a central emblem with a bird and a shield, surrounded by the text "DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI". Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink.

H. GUS SUNOTO IM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI  
 NOMOR : 170/40/419.050/2022  
 TANGGAL : 17 JUNI 2022

---

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022**

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN		
1.	Perda Eksekutif	Pembentukan Dana Cadangan Pemilukada Tahun 2024	Pencadangan dana untuk persiapan Pemilukada Tahun Tahun 2024	√		- Pasal 303 UU No 23/2014 - PP No 12/2019	√		Kesbangpol	Januari 2022
2.	Perda Inisiatif	Penanganan Permasalahan Sosial	Masih banyaknya permasalahan yang belum social yang belum tartangani di luar data dari Kementrian Sosial RI	√		- Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 - UU Nomor 40 Tahun 2004 - UU Nomor 11 Tahun 2009 - UU Nomor 13 Tahun 2013 - PP Nomor 31 Tahun 1980 - PP Nomor 52 Tahun 2019	√		Dinsos	Januari 2022
3.	Perda Inisiatif	Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	- Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas - Aksebilitas penyandang	√		- UU Nomor 8 Tahun 2016 - PP No 52 Tahun 2019	√		- Dinsos - Dinkes ( DPRD )	Januari 2022

			disabilitas terhadap fasilitas Publik								
4	Perda Eksekutif	Perubahan Kedua Atas Perda Kota Kediri Nomor 4 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas registrasi</li> <li>- Pencatatan biodata penduduk</li> <li>- Penerbitan KTP</li> <li>- Surat keterangan pindah datang</li> <li>- Pendaftaran pindah datang</li> <li>- Batasan waktu penerbitan dokumen kependudukan</li> <li>- Legalisir dokumen kependudukan</li> <li>- Sistem informasi kependudukan</li> </ul>							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Maret 2022
5.	Perda Inisiatif	Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pokok-pokok perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>- Mencabut Perda Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020</li> <li>- PP No 22 Tahun 2021</li> </ul>				DLHKP	April 2022
6.	Perda Eksekutif	Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat pengelola keuangan daerah</li> <li>- Mekanisme penyusunan RKA</li> <li>- Mekanisme penyusunan</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP No 12 Tahun 2019</li> <li>- Permendagri 77 Tahun 2020</li> </ul>				BPPKAD	April 2022

			APBD							
7.	Perda Eksekutif	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	- Pelaksanaan belanja daerah	√		- PP No 12 Tahun 2019 - Permendagri No 77 Tahun 2020	√		BPPKAD	Mei 2022
8	Perda Inisiatif	Penyelenggaraan Smart City	Pemerintahan yang cerdas dan memunculkan inovasi-inovasi baru	√		- Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 - Perpres No 95 Tahun 2018 - UU No 25 Tahun 2009	√		Bappeda	Mei 2022
9.	Perda Eksekutif	Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah	Rencana strategis pengembangan pariwisata	√			√		Disbudparpora	Juni 2022
10.	Perda Eksekutif	Rencana Induk Ekonomi Kreatif Kota Kediri Tahun 2022-2025	Rancangan strategis pengembangan ekonomi kreatif	√		- UU Nomor 24 Tahun 2019 - Perpres Nomor 142 Tahun 2018	√		Barenlitbang	Juni 2022
11.	Perda Eksekutif	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pengaturan dan penetapan LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) dan LAD (Lembaga Adat Desa) di kelurahan diatur dengan Peraturan Walikota	√ (mencabut Perda 12/2013 ttg LKK)		Permendagri No 18 Tahun 2018	√		Bagian Pemerintahan	Juli 2022

12	Perda Eksekutif	Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri	- Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2021		v	-			Organisasi	Juli 2022
13	Perda Eksekutif	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	- Pendapatan daerah - Belanja daerah	v		- PP No 12 Tahun 2019 - Permendagri No 77 Tahun 2020		v	BPPKAD	Agustus 2022
14	Perda Eksekutif	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	- Pendapatan daerah - Belanja daerah	v		- PP No 12 Tahun 2019 - Permendagri 77 Tahun 2020		v	BPPKAD	Oktober 2022
15	Perda Eksekutif	Perubahan Perda Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal	- Kebijakan dasar penanaman modal - Bidang usaha dan bentuk badan usaha - Pengembangan penanaman modal		v	Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang g Bidang Usaha Penanaman Modal	v		DPMPSTSP	Oktober 2022
16	Perda Eksekutif	Bangunan Gedung	- Wewenang, tanggung jawab dan kewajiban pemda - Klasifikasi bangunan gedung	v		PP Nomor 16 Tahun 2021	v		Dinas PUPR	Oktober 2022

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar teknis bangunan gedung</li> <li>- Penyelenggaraan bangunan gedung</li> <li>- Pembinaan</li> <li>- Peran serta masyarakat</li> <li>- Sanksi administratif</li> <li>- Mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang IMB</li> </ul>							
17	Perda Eksekutif	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan dan peningkatan produktifitas tenaga kerja</li> <li>- Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja</li> <li>- Hubungan kerja</li> <li>- Perlindungan dan pengupahan</li> <li>- Jaminan sosial</li> <li>- Fasilitas kerja</li> <li>- Hubungan industrial</li> </ul>		Y	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 11 Tahun 2020</li> <li>- PP Nomor 34 Tahun 2021</li> <li>- PP Nomor 35 Tahun 2021</li> </ul>		Y	Dinkop UMTK	Oktober 2022
18	Perda Eksekutif	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekanisme pembentukan koperasi</li> <li>- Kriteria pendirian koperasi</li> <li>- Pengawasan koperasi</li> </ul>		Y	PP Nomor 7 Tahun 2021		Y	Dinkop UMTK	Oktober 2022

19	Perda Eksekutif	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>- Persyaratan dasar Perizinan Berusaha</li> <li>- Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.</li> <li>- Mencabut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan</li> <li>b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perizinan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>c. Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang Izin Usaha bagi Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam wilayah Kota Kediri</li> <li>d. Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang IUJK</li> <li>e. Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perizinan Pengelolaan Air Tanah</li> <li>f. Sebagian ketentuan dalam perda-perda lain yang berkaitan</li> </ul> </li> </ul>	y		PP Nomor 6 Tahun 2021	y		DPM-PTSP	November 2022
----	-----------------	--	--	---	--	-----------------------	---	--	----------	---------------

			dengan perizinan.							
20	Perda Eksekutif	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Kriteria Usaha Mikro		√	PP Nomor 7 Tahun 2021		√	Dinkop UMTK	November 2022
21	Perda Eksekutif	Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi dan Usaha Mikro	- Kriteria UMKM - Penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian pinjaman dan dana bergulir	√		- UU Nomor 23 Tahun 2014 - PP Nomor 7 Tahun 2021		√	Dinkop UMTK	November 2022

KETUA DPRD KOTA KEDIRI,



H. GUS SUNOTO IM